



ACTION PLAN FOR MANDATORY EE BUILDING CODE IN INDONESIA

Kunaefi

Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation
Ministry of Energy and Mineral Resources

SE4ALL Workshop on EE&C Building Code
Tokyo, 14 - 16 February 2017



Action Plans

No.	Activities	Detail	PIC	Year				
				1	2	3	4	5
1	Preparing Roadmap Mandatory EE Building Code	<ul style="list-style-type: none"> Mapping on capacity/readiness of city to implement Mandatory EE Building Code Output is list of cities which will be target/priority 	Ministry Public Works					
2	Increasing The Awareness And Commitment Of Local Government Leaders on EE Building Code	<ul style="list-style-type: none"> Conduct by executive briefing, consultation, etc. Output is high level's commitment and local regulation 	Ministry Public Works					
3	Revise National Standard on EE in Building 2011	On going	Ministry of Energy					
4	Capacity building for Local Government, Energy Manager and Energy Auditor	By training 2x per year for local government, 5x per year for energy manager and 2x per year for energy auditor	Ministry of Energy					
5	Developing Online Tool/Calculator EE Building	Make easier building operator to calculate EE parameter and local government to asses submission	Ministry of Energy					
6	Developing Benchmarking on EE Building Sector	<ul style="list-style-type: none"> Benchmarking use multiple regression (Japan model) Use result of survey EE in building sector 2017 	Ministry of Energy					





BUPATI BANJAR

Martapura, 4 November 2015

Nomor : 600/1411/Disperkim/2015
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Minat Mengikuti
Program Pengembangan Kota Hijau
(P2KH)

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
di
Jakarta

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032, serta memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan berminat untuk mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya ;
 2. Pemerintah Kabupaten Banjar siap untuk membentuk Tim Swakelola Pelaksana kegiatan P2KH sesuai dengan arahan ;
 3. Pemerintah Kabupaten Banjar siap untuk menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dalam pelaksanaan P2KH dan mewujudkan Kota Hijau; dan
 4. Untuk memenuhi persyaratan pendukung terkait pelaksanaan P2KH dimaksud, kami bersedia untuk segera menyusun dokumen Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH).
- Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

